



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
POKJA PEMILIHAN**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon: 3852478 Faksimili: 3441258

Nomor : BM.2.4/01/SET.M.EKON.UKPBK.POKJA/SEWA-RUANG-EKODI/12/2023
Hal : Pemasukan Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Lainnya Nonkompetisi
Sewa Ruang Kantor untuk Keasdepan Ekonomi Digital Tahun Anggaran 2024
Tanggal: 4 Desember 2023

Yth. Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia
Jl. Banda No. 30, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan
Kota Bandung

Bersama ini kami sampaikan, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang kantor *full furnished*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memerlukan jasa sewa ruang kantor guna mendukung kegiatan operasional Tahun Anggaran 2024 selama 12 (dua belas bulan) untuk periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 (spesifikasi terlampir) dengan luas total 425,55 m². Adapun lingkup pekerjaan penyedia jasa meliputi:

- a. Menyediakan ruang kantor *full furnished* seluas 425,55 m² dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan ruang kantor yang dibutuhkan;
- b. Melakukan pengukuran bersama untuk menentukan luas ruang aktual di lapangan serta melaksanakan *stock opname* kondisi ruang sebelum serah terima dilaksanakan;
- c. Memelihara fisik dan estetika bangunan, baik eksterior dan interior maupun mekanikal dan elektrik;
- d. Mengelola dan memelihara standar keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Mengelola dan mengawasi operasional bangunan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, kami Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang perusahaan Saudara untuk menjadi penyedia jasa sewa gedung tersebut dengan syarat sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin perusahaan dalam bidang jasa penyewaan/pengelolaan gedung/kantor.

2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia.
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk daftar hitam.
4. Memiliki Status Valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak).
5. Memiliki bukti setor SPT Tahunan terakhir dan bukti lunas PBB satu tahun terakhir.
6. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
7. Memiliki pengalaman pada bidang yang sejenis dan mempunyai SDM, manajerial, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk penyediaan jasa.
8. Menandatangani Pakta Integritas.

Kami mohon agar Saudara menyampaikan kepada kami dokumen penawaran sebagaimana pengadaan jasa tersebut di atas paling lambat hari Kamis, 7 Desember 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Pokja Pemilihan,



Tammy Amelia Pratiwi